



**ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI UNTUK MENILAI  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  
Pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**SANDRINNA FANNYSSA SALWA'A SUHERWIN  
NPM. 1915100575**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL DAN SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

**MEDAN**

**2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI UNTUK MENILAI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NAMA : SANDRINNA FANNYSSA SALWA'A SUHERWIN  
N.P.M : 1915100575  
FAKULTAS : SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI : Akuntansi  
TANGGAL KELULUSAN : 08 Mei 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

DISETUJUI  
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dito Aditia Darna Nst, S.E., M.Si.

PEMBIMBING II



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sandrinna Fannyssa Salwa'a Suherwin  
NPM : 1915100575  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Sistem Informasi Akuntansi untuk Menilai Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpub untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Maret 2024



Sandrinna Fannyssa Salwa'a Suherwin  
NPM : 1915100575

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SANDRINNA FANNYSSA  
Tempat / Tanggal Lahir : SALWA'A SUHERWIN  
Perbaungan / 30-09-2001  
NPM : 1915100575  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat : DUSUN III

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains

Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 11 Mei 2024

menbuat pernyataan



SANDRINNA FANNYSSA  
SALWA'A SUHERWIN

## ABSTRACT

*This research is entitled "Analysis of Accounting Information Systems to Assess the Quality of Financial Reports at the Serdang Bedagai Regency Population and Civil Registration Service Office." This research was carried out using qualitative research techniques. The data used comes from primary and secondary sources, with an emphasis on collecting data through interviews with three informants who are experts in the problem being researched. They have relevant knowledge and skills in the field. The results of this study indicate that the use of the Accounting Information System in the Population and Civil Registration Service Office of Serdang Bedagai Regency. It can be seen that the requirements for quality financial reports have been complied with in accordance with the provisions of Government Accounting Standards in Government Regulation Number 71 of 2010. Although there are still several obstacles in implementation, such as frequent difficulties in calculating depreciation of fixed assets. The results of the study also show that the financial reports at the Serdang Bedagai Regency Population and Civil Registration Service Office have met the desired quality standards, in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010, namely: relevant, reliable, comparable and understandable. The suggestions given to the Population and Civil Registration Service of Serdang Bedagai Regency should be used as a guideline to remain consistent and continue to carry out outreach to the relevant Sector Units so that the quality of financial reports is maintained and continues to improve.*

**Keywords:** *Accounting Information System, Quality of Financial Reports.*

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi untuk Menilai Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai” Penelitian ini dilaksanakan dengan memanfaatkan teknik penelitian kualitatif. Data yang digunakan berasal dari sumber-sumber primer dan sekunder, dengan penekanan pada pengumpulan data melalui wawancara dengan tiga informan yang ahli dalam masalah yang sedang diteliti. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dalam bidang tersebut. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penggunaan Sistem Informasi Akuntansi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai. Dapat dilihat bahwa persyaratan untuk laporan keuangan yang berkualitas telah dipatuhi sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Meskipun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, seperti seringkali menghadapi kesulitan dalam menghitung penyusutan aset tetap. Hasil studi juga menunjukkan bahwa laporan keuangan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai telah memenuhi standar kualitas yang diinginkan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu: relevan, reliable, dapat dibandingkan, dan dapat dimengerti. Saran yang diberikan kepada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai sebaiknya dijadikan pedoman untuk tetap konsisten dan terus melakukan sosialisasi kepada Satuan Bidang terkait agar kualitas laporan keuangan tetap terjaga dan semakin meningkat.

**Kata kunci:** Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Laporan Keuangan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat mengajukan skripsi ini yang disusun guna memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Adapun judul yang penulis ajukan membahas “Analisis Sistem Informasi Akuntansi untuk Menilai Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai”.

Dalam proses pembuatan skripsi ini, tentunya penulis mendapatkan bimbingan, arahan, koreksi dan saran yang telah banyak membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapatkan imbalan Tuhan Yang Maha Esa sebagai amal ibadah, Amin. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM, selaku Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si., CIQaR., CIQnR selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Dr. *Oktarini* Khamilah Siregar, SE., M.SI selaku Kepala Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak Dito Aditia Darma Nst, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial dan Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Teristimewa kedua orang tua tercinta serta keluarga yang telah berkorban waktu, tenaga dan materi untuk mendidik dan membesarkan penulis hingga saat ini.
8. Teman-teman se-Angkatan yang selalu membantu dan memberi semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
9. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. Akhir kata kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis secara pribadi.

Medan,   Maret 2024

Penulis

Sandrinna Fannyssa Salwa'a Suherwin  
NPM : 1915100575



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b>	
<b>PERNYATAAN</b>	
<b>ABSTRACT</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	10
1.2.1. Identifikasi Masalah .....	10
1.2.2. Batasan Masalah.....	11
1.3. Rumusan Masalah.....	11
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1. Tujuan Penelitian .....	11
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Keaslian Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
2.1. Landasan Teori .....	15
2.1.1. Teori Signal ( <i>Signaling Theory</i> ) .....	15
2.1.2. Sistem Informasi Akuntansi.....	16
2.1.3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	25
2.2. Penelitian Terdahulu .....	32
2.3. Kerangka Pemikiran.....	34
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	36
3.1. Pendekatan Penelitian .....	36
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian .....	36
3.3. Definisi Operasional .....	37
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	38
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.6. Teknik Analisis Data.....	40
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data (Triangulasi).....	42

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
	4.1. Hasil Penelitian.....	43
	4.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	43
	4.1.2. Deskripsi Hasil Wawancara.....	47
	1. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai .....	47
	2. Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.....	55
	4.2. Pembahasan.....	57
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
	5.1. Kesimpulan.....	61
	5.2. Saran .....	61
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 1.1	Perkembangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015-2017 .....	6
Tabel 1.2	Temuan BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2014-2017 .....	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 3.1	Rencana Jadwal Penelitian .....	37
Tabel 3.2	Definisi Operasional Variabel .....	38

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1. Sistem Informasi di dalam aktivitas akuntansi .....	24
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran .....	35
Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai .....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah memiliki kewenangan yang jelas dalam pengelolaan pemerintahannya, termasuk dalam pengelolaan laporan keuangan. Sebagai sebuah lembaga atau badan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah dituntut pula harus melaksanakan pemerintahan secara terbuka dan bertanggung jawab atas pengelolaan laporan keuangan tersebut. Langkah nyata dalam menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah, yaitu dengan melalui pengungkapan laporan keuangan yang bertanggung jawab, di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Penyusunan laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah harus mematuhi prinsip-prinsip dan standar akuntansi Pemerintah. Oleh sebab itu, informasi yang terdapat pada LKPD harus memiliki kualitas yang tinggi dan menarik saat disajikan, serta memberikan manfaat yang relevan sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Keakuratan dan kejujuran informasi yang disajikan dalam sebuah laporan keuangan merupakan indikator utama dari kualitas laporan tersebut. Penilaian atau analisis laporan keuangan pemerintah daerah melibatkan pengukuran, pencatatan, dan transaksi ekonomi yang mencerminkan aktivitas keuangan entitas akuntansi di dalam pemerintahan daerah. Data tersebut digunakan untuk mengevaluasi tanggung jawab keuangan manajemen entitas akuntansi dan membuat keputusan ekonomi oleh berbagai pihak yang terlibat (Erlina dkk, 2015:25).

Menurut Ihsanti, (2014:51) “Laporan keuangan dianggap memiliki kualitas yang baik ketika informasi yang disajikan mudah dipahami dan memenuhi kebutuhan para pengguna dalam mengambil keputusan ataupun membuat suatu kebijakan. Laporan keuangan tersebut tidak hanya bebas dari penyajian informasi yang menyesatkan dan kesalahan yang signifikan, tetapi juga dapat dipercaya, sehingga memungkinkan untuk dibandingkan dengan periode sebelumnya.”

Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh bagaimana informasi disajikan dan proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka konseptual, prinsip-prinsip dasar, dan tujuan akuntansi. Salah satu hal yang memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem informasi akuntansi. Proses pembuatan laporan keuangan sangat bergantung pada kualitas input, proses, dan output dari sistem ini. Tiga aspek ini perlu digabungkan dan dipertahankan sebagai landasan yang kuat dari sistem pelaporan keuangan yang berkualitas (Kurniawan dalam Ikhsan, 2018:5).

Penggunaan sistem informasi keuangan daerah sangat penting untuk mengolah, mengatur, dan menelaah data keuangan daerah dan informasi terkait agar dapat dikomunikasikan kepada masyarakat serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan tanggung jawab pemerintah daerah. Pemanfaatan sistem informasi agar dapat meningkatkan produktivitas pemerintah daerah. Untuk mendapatkan data-data tersebut, diperlukan sistem manajemen keuangan yang baik, termasuk sistem akuntansi yang memadai.

Sistem Informasi Akuntansi adalah metode yang dapat memudahkan proses pengolahan data secara akurat, efisien, dan aman, serta berfungsi sebagai sarana komunikasi yang tepat dan terkoordinasi antara manajemen. Hal ini memungkinkan transformasi data keuangan menjadi informasi yang berkualitas dan bermanfaat. Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan potensi yang luas untuk memanfaatkannya, banyak pihak sekarang memiliki kesempatan untuk mengakses, mengelola, dan menggunakan informasi keuangan daerah dengan lebih efisien dan akurat.

Pemerintah daerah membutuhkan sistem informasi akuntansi keuangan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan keuangan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan daerah. Dari sistem manajemen keuangan daerah, kepala unit kerja dapat mengawasi sejauh mana suatu program atau kegiatan telah dilaksanakan, sejauh mana dana telah diserap untuk program atau kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat dinilai apakah program atau kegiatan yang dilakukan sudah hemat, efisien dan berhasil. Setiap kepala OPD harus melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja OPD. Diperlukan tindakan segera untuk memastikan pencapaian target kinerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Akan tetapi faktanya, permasalahan terkait kualitas laporan keuangan masih menjadi topik pembicaraan yang kontroversial, dengan banyaknya kasus yang mengindikasikan rendahnya mutu laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang masih memerlukan perhatian serius dan investigasi lebih lanjut. Bukti ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang standar akuntansi pemerintah dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang tidak memadai, serta

kurangnya keahlian staf akuntansi dan sistem pengendalian intern yang kurang efektif. Dampak yang terjadi adalah merugikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Masalah ini terungkap melalui adanya perbedaan pendapat di beberapa lembaga pemerintah daerah di Indonesia. Laporan keuangan menghadapi tantangan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa item yang disajikan, sehingga menyebabkan penyangkalan opini terhadapnya. Penyebab utama dari laporan keuangan yang buruk adalah karena kurangnya kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan dan kurangnya manajemen keuangan daerah yang baik (Wardina 2015:141).

Fakta bahwa masih terdapat banyak data yang tidak akurat dalam laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa hal ini butuh perhatian lebih serius. Banyak penyimpangan masih ditemukan diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan saat melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan situasi ini, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah masih belum sepenuhnya memenuhi standar dan komponen-komponen yang membentuk kualitas laporan keuangan, yang seharusnya memberikan nilai atau manfaat (Sanjaya, 2017:5).

Menurut laporan ringkas dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), hasil pemeriksaan semester (IHPS) I tahun 2022 menunjukkan bahwa BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 541 dari total 542 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021. Dari hasil pemeriksaan tersebut, 41 Lembaga Keuangan Perkreditan Desa (LKPD) belum berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurut Isma Yatun, yang menjabat sebagai Ketua BPK, sulitnya penyajian laporan



keuangan pada 41 LKPD disebabkan oleh berbagai permasalahan yang memengaruhi kepatutan, terutama pada akun aset tetap dan akun belanja modal. Sebanyak 500 pemerintah daerah (Pemda) mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebesar 92,4%, 38 Pemda mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebesar 7%, dan tiga Pemda mendapat penilaian Tidak Menyatakan Pendapat/TMP sebesar 0,6%. Dalam laporan tersebut, BPK juga mencatat 9.158 hasil pemeriksaan yang mencakup 15.674 isu dengan total nilai sebesar Rp18,37 triliun. Sebanyak 51,8% atau 8.116 kasus merupakan pelanggaran terhadap hukum sebesar Rp17,33 triliun. Setelah itu, sebanyak 44,8% atau 7.020 dari masalah tersebut terkait dengan kekurangan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan 3,4% atau 538 masalah terkait ketidakefisienan, ketidakhematan, dan ketidak-efektifan (3E) senilai Rp1,04 triliun ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)).

Sari (2022) menyatakan bahwa “Rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah disebabkan oleh ketidaksesuaian pembuatan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sistem penyusunan laporan keuangan yang kurang kuat, dan kekurangan kompetensi sumber daya manusia dalam manajemen keuangan.” Hal ini terbukti dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), di mana masih terdapat pemerintah daerah yang belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menunjukkan rendahnya kualitas laporan keuangan (Pamungkas, 2018).

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai satu dari pemerintahan kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di wilayah tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat dalam upaya meningkatkan efektivitas dan hasil dari pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan sesuai dengan hukum yang berlaku. Demi meningkatkan layanan dan pelaksanaan pembangunan di kabupaten Serdang Bedagai, diharapkan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mampu mengelola aset dan kekayaan daerah dengan baik.

Kesulitan dalam menyusun laporan keuangan daerah telah menjadi fenomena yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai terkait dengan kualitas laporan keuangannya. Meskipun pemerintah daerah sudah mengesahkan regulasi dari Bupati mengenai kebijakan akuntansi yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Permendagri No. Pada tahun 2013, sebagian hasilnya masih belum memenuhi semua persyaratan yang tercantum dalam Buletin Teknis Kebijakan Akuntansi Pemerintahan sesuai harapan Badan Pemeriksa Keuangan.. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Serdang Bedagai pada Tahun 2015-2017 sebagaimana dapat dilihat di bawah ini.

**Tabel 1.1 Perkembangan Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015-2017**

Tahun	2015	2016	2017
Opini	WDP	WDP	WDP

(Sumber: BPK-RI Perwakilan SUMUT, 2024)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2015-2017 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (Daftar opini LKPD 2014-2017 BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara, 2018). Menurut Endarto (2014:20), “Kurangnya penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam program aplikasi berbasis akrual di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, karena tidak sesuai dengan batas waktu penerapan yang telah ditetapkan dan kerangka indikatornya belum sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan.”

Laporan Keuangan konsolidasi yang dinilai kualitasnya oleh BPK adalah kumpulan laporan keuangan yang disatukan dari berbagai OPD. Data yang disediakan oleh OPD dalam laporan keuangannya akan digunakan sebagai referensi dalam menyusun laporan konsolidasi. Jika penyusunan laporan keuangan oleh OPD tidak efektif, hal tersebut akan berdampak pada kualitas dari Laporan Keuangan Konsolidasi tersebut. Ini dapat dilihat pada tabel temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2014-2017 di bawah ini.

**Tabel 1.2 Temuan BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2014-2017**

Tahun	2014	2015	2016	2017
Temuan dan Daftar Akun yang disajikan tidak Sesuai dengan SAP	1. Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	1. Aset tetap 2. Beban LO	1. Aset Lancar 2. Aset Tetap 3. Belanja Modal	1. Aset Lancar 2. Aset Tetap 3. Aset Lainnya 4. Belanja Operasi 5. Belanja Modal 6. Beban Operasi LO

(Sumber: BPK-RI Perwakilan SUMUT, 2024)

Berdasarkan kasus yang terungkap dan opini yang didapat oleh pihak Kabupaten Serdang Bedagai, terdapat bukti bahwa Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai secara keseluruhan belum menggambarkan kondisi dan situasi yang sebenarnya. Pada tahun 2014, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini yang baik tanpa adanya pengecualian. Meskipun begitu, BPK menemukan beberapa hal, seperti kekurangan dalam sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (4 insiden), serta kekurangan dalam sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (3 insiden). Hal ini disebabkan kurangnya manajemen dan akuntabilitas keuangan yang efektif oleh pemerintah daerah, dan masih terdapat kekurangan dalam pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan. Karena itu, pentingnya sistem informasi akuntansi daerah yang efektif harus diakui, dan harus sesuai dengan tujuan utama sistem informasi akuntansi, yakni untuk menciptakan laporan akuntansi yang berkualitas.

Pada prinsipnya, disamping Kepala Daerah, terdapat beberapa peran tambahan yang berperan penting dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Dalam hal ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memainkan peran yang sangat vital. Pihak OPD merupakan yang paling ahli dan terampil dalam mengurus keuangan daerah, dikarenakan mereka bertanggung jawab sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pengguna Barang (PB). Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam hal ini. Dengan demikian, peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan berkontribusi pada peningkatan kualitas kinerja daerah terutama dalam pengelolaan keuangannya dan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan bagian dari struktur pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan daerah dan memberikan layanan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Setiap unit kerja akan diberi alokasi anggaran dan sarana yang diperlukan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Sebagai hasilnya, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diistilahkan sebagai Penanggung Jawab Keuangan (PJ) dan Penanggung Jawab Aset (PJA). Secara prinsip, Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) menunjukkan bahwa mereka melakukan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan dikirimkan kepada kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah.

Begitu juga dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab dalam menyusun laporan keuangannya serta melaporkan aktifitas penggunaan anggarannya secara transparan kepada publik. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya sering terjadi keterlambatan dalam menginput dan melaporkan aktifitas serapan anggaran yang telah dicapainya.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang penulis lakukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, terlihat bahwa laporan keuangan yang disajikan adalah aktifitas kegiatan keuangan bulan sebelumnya. Hal ini berarti bahwa jika aktifitas keuangan dilaporkan pada bulan Januari, maka laporan akan disusun dan diajukan pada bulan Februari. Tidak diragukan lagi bahwa situasi tersebut berdampak pada mutu laporan keuangan karena seringkali terjadi keterlambatan dalam penginputan data kegiatan

keuangan. Keadaan di atas menunjukkan bahwa laporan keuangan belum mencapai standar yang diinginkan, dengan satu hal yang memengaruhi laporan keuangan adalah seringnya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Jika waktu pelaporan aktifitas keuangan tidak tepat, maka hal ini akan mempengaruhi keakuratan data yang dibutuhkan. Berdasarkan fakta di lapangan, informasi keuangan yang disampaikan belum memenuhi standar untuk keakuratan dan ketepatan waktu dalam sistem informasi akuntansi. Kemampuan pemerintah dalam efektif mengelola informasi menjadi krusial karena dapat menjadi fondasi untuk pelaksanaan pemerintahan yang efisien.

Berbagai uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat menjadi topik pembahasan dalam menyusun skripsi dengan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Informasi Akuntansi untuk Menilai Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai”**

## **1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Dengan mempertimbangkan konteks permasalahan tersebut di atas, dapat ditemukan beberapa isu yang timbul, antara lain:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2015-2017 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian.
2. Masih terjadinya keterlambatan waktu dalam menyampaikan laporan aktifitas keuangan.

3. Belum tercapainya Kriteria Sistem Informasi Akuntansi yang ideal dimana dalam laporan keuangan karena masih ada kekurangan dalam pengawasan akuntansi dan penyajian informasi keuangan.

### **1.2.2. Batasan Masalah**

Agar tidak memicu perdebatan yang terlalu luas, penulis membatasi ruang lingkup topik yang akan diselidiki dalam studi ini. Penelitian ini akan berfokus secara eksklusif pada fokus masalah “Analisis Sistem Informasi Akuntansi untuk Menilai Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.”

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan, masalah utama yang akan diselidiki dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai?
2. Bagaimana kualitas laporan keuangan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai?

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada identifikasi dan juga rumusan permasalahan pada penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas laporan keuangan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya, yaitu:

1. Bagi mahasiswa
  - a. Dapat menambah pengetahuan dan memahami konsep-konsep tentang sistem informasi akuntansi dan kualitas laporan keuangan.
  - b. Memperkuat pengetahuan yang diperoleh selama menempuh studi dan membandingkan konsep dan teori dengan praktik di lapangan..
2. Bagi Perguruan Tinggi
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan informasi, sehingga karya tulis ini dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Ekonomi Akuntansi.

3. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan rujukan bagi lembaga terkait dalam membuat keputusan mengenai sistem informasi akuntansi dan kualitas laporan keuangan.



### 1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian sangat penting karena menunjukkan bahwa tidak ada kasus plagiarisme antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang tengah dilakukan. Penelitian ini merupakan adaptasi, modifikasi dan perluasan dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hidayat Lubis (2019). Terdapat perbedaan dan persamaan diantara keduanya, sebagaimana dapat dilihat pada uraian berikut:

1. **Judul Penelitian:** Penelitian terdahulu berjudul: “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Atas Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara”. Sedangkan penelitian ini memiliki judul yang hampir sama dengan judul penelitian sebelumnya yaitu berjudul: “Analisis Sistem Informasi Akuntansi untuk Menilai Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai”.
2. **Variabel Penelitian:** Variabel penelitian yang digunakan sama-sama fokus membahas tentang Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas laporan keuangan daerah.
3. **Metode penelitian:** Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif.
4. **Waktu Penelitian:** Penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2019 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2023.
5. **Objek Penelitian:** Penelitian terdahulu dilakukan pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan penelitian ini dilakukan

pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.

Berdasarkan penjelasan di atas, meskipun sudah ada studi sebelumnya yang terkait dengan sistem informasi akuntansi dan mutu laporan keuangan daerah, namun tetap terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian berjudul "Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi dalam Menilai Kualitas Laporan Keuangan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai" adalah hasil penelitian orisinal yang dilakukan oleh penulis tanpa adanya unsur plagiat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Signal (*Signaling Theory*)**

Teori Signal berasal dari teori akuntansi praktis yang memusatkan perhatian pada bagaimana informasi memengaruhi perubahan perilaku para pengguna informasi. Teori ini menjelaskan bagaimana akuntansi dapat digunakan untuk menyampaikan sinyal informasi tentang keadaan perusahaan atau instansi. Menyampaikan informasi tentang kondisi perusahaan atau instansi kepada pemilik atau pihak yang memiliki kepentingan adalah tujuan dari sinyal tersebut (Godfrey dkk, 2017).

Perusahaan/instansi perlu menyampaikan informasi terkait dengan kondisi perusahaan/instansi kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui laporan keuangan dan laporan kinerja. Tanggung jawab ini harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Salah satu kelebihan utama dari konsep ini adalah komunikasi yang diberikan oleh perusahaan atau lembaga, seperti kepatuhan waktu dalam penyampaian laporan keuangan dan pencapaian kinerja perusahaan atau lembaga. Sinyal-sinyal ini akan direspons oleh para pihak yang terlibat sebagai dasar untuk membuat keputusan.

Dalam penelitian ini, konsep signal theory menegaskan bahwa pihak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, yang diberi amanah, dapat memberikan informasi akuntansi melalui laporan keuangan yang disajikan dengan sistem informasi akuntansi yang komprehensif dan berkualitas, sehingga dapat dipercaya oleh pihak yang memberikan kepercayaan.

## **2.1.2. Sistem Informasi Akuntansi**

### **1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi**

Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang dikelola dan telah diberi makna untuk menambah wawasan, memperbarui pengetahuan, dan sebagai dasar dalam berpendapat. Bahkan tak jarang informasi dapat berperan sebagai bahan pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi pada prinsipnya merupakan bagian yang sangat krusial dalam menyediakan segala informasi yang diperlukan oleh manajemen. Mulyadi (2016:3) menjelaskan bahwa “Sistem Informasi Akuntansi yaitu susunan dokumen, data, dan laporan yang disusun secara teratur untuk menyajikan informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan dengan lebih mudah.”

Bodnar & William (2017:3), juga menjelaskan bahwa “Sistem informasi akuntansi dapat diartikan sekumpulan sumber daya, yang direncanakan untuk mengolah data keuangan dan data kinerja lainnya menjadi suatu informasi.” Selanjutnya Widjajanto dalam Hanum dkk (2017:2) menjelaskan bahwa “Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terdiri dari formulir, catatan, perangkat, peralatan, seperti komputer dan peralatan alat komunikasi. Selain itu, melibatkan staf yang melaksanakannya, dan laporan-laporan yang terkoordinasi dengan baik dengan tujuan untuk mengubah angka-angka keuangan menjadi informasi yang penting.”

Pendapat senada dikemukakan oleh Romney & Steinbart (2018:10), yang menyatakan bahwa “Sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang dapat mencatat, menghimpun, dan mengolah data menjadi informasi yang diperlukan oleh para pengambil keputusan.” Pendapat ini didukung oleh Tyoso (2017:35), yang menjelaskan bahwa “Sistem akuntansi menyimpan data mentah

mengenai transaksi bisnis, seperti transaksi pembelian, penjualan, pengeluaran dan penerimaan kas. Setelah itu, informasi akan diolah untuk membuat laporan keuangan, baik bulanan maupun tahunan, yang mencakup penutupan buku”.

Berdasarkan paparan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi, menurut beberapa definisi sebelumnya, adalah suatu sistem yang menghasilkan data keuangan yang bermanfaat bagi para pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi dan situasi perusahaan.

## **2. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi**

Diperlukan perencanaan yang matang dalam merancang sistem informasi guna memenuhi kebutuhan informasi dari pihak otoritas eksternal maupun internal. Sebuah sistem akuntansi harus memiliki tujuan yang jelas untuk mendukung manajemen dalam melakukan tugasnya serta menghasilkan informasi yang bermanfaat terutama dalam mendukung perencanaan dan pengendalian.

Menurut Mulyadi (2016) menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi paling tidak harus memiliki empat tujuan, yakni:

- a. Meningkatkan sistem kontrol akuntansi dan pemeriksaan internal dengan tujuan untuk menyajikan catatan yang komprehensif tentang pertanggung jawaban dan perlindungan aset perusahaan, serta meningkatkan keandalan informasi akuntansi.
- b. Memberikan data tentang bagaimana manajemen perusahaan telah berkinerja untuk digunakan dalam pengelolaan kegiatan bisnis.
- c. Meningkatkan data yang dihasilkan oleh sistem yang telah ada, termasuk kualitas, akurasi, dan struktur informasinya.

- d. Untuk mengurangi pengeluaran administratif dalam pelaksanaan pencatatan keuangan

Susanto (2018:8) menjelaskan bahwa “Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi adalah untuk menghimpun data keuangan dari berbagai sumber, baik dari sumber internal (manager) maupun dari eksternal perusahaan (konsumen dan supplier) kemudian mengolahnya menjadi informasi akuntansi yang diperlukan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan.”

Berdasarkan berbagai uraian pendapat tersebut di atas menyiratkan bahwa sebuah sistem informasi dinyatakan efektif apabila sistem tersebut mampu menghasilkan informasi yang bermanfaat, dapat dipercaya, dapat diandalkan, serta sesuai dengan kebutuhan, termasuk informasi yang tepat waktu dan juga dapat meningkatkan perlindungan terhadap aset perusahaan dan mengurangi biaya administratif dengan seoptimal mungkin.

### **3. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi**

Penerapan sistem informasi akuntansi yang efektif diharapkan dapat menciptakan informasi yang berkualitas tinggi, memberikan keuntungan bagi manajemen, serta mendukung pengguna informasi lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Meningkatkan performa akuntansi adalah tujuan utama dari sistem informasi akuntansi dengan menyediakan informasi yang berkualitas, termasuk informasi yang tepat waktu, relevan, akurat, terpercaya, dan komprehensif. Tujuan dari hal ini adalah untuk menjamin bahwa informasi tersebut memiliki kegunaan dan makna secara keseluruhan.

Menurut Susanto (2018:8), sistem informasi akuntansi memiliki beberapa fungsi yang penting. Salah satunya adalah fungsi utama, yaitu ada tiga fungsi utama yang dimiliki oleh sistem informasi akuntansi, antara lain:

- a. Memberikan support untuk aktivitas harian perusahaan. Agar perusahaan tetap berjalan, perusahaan harus terus melakukan kegiatan bisnis seperti pembelian, pengelolaan persediaan, proses produksi, dan penjualan, yang semuanya bisa disebut sebagai transaksi. Bagian dari sistem informasi akuntansi, yaitu SPT akan memproses segala transaksi yang terkait dengan akuntansi. Informasi operasional yang tidak berkaitan dengan akuntansi dan kegiatan lain yang tidak ditangani oleh sistem informasi perusahaan akan diolah oleh SPT. Dengan adopsi sistem manajemen informasi keuangan, perjalanan operasional perusahaan dapat berlangsung tanpa ada kendala.
- b. Ikut serta dalam proses membuat keputusan. Sistem informasi akuntansi bertujuan untuk menyediakan data yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem ini bukan hanya memiliki nilai yang penting, tetapi juga memiliki peran yang sama pentingnya dalam menyajikan informasi yang relevan dan tepat bagi para pengguna. Keputusan harus dipertimbangkan dengan teliti dan diawasi dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan.
- c. Memberikan bantuan dalam menjalankan kewajiban manajemen perusahaan. Bagi setiap perusahaan wajib menunaikan tanggung jawab hukumnya. Sebagai bagian penting dari tugasnya, dia harus memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disampaikan dengan tepat dan benar.

Menurut Zamzami dkk (2016:44), “Sistem informasi akuntansi memiliki peran penting sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja finansial perusahaan. Dengan demikian, dalam proses ini, pengusaha harus secara rutin mengawasi perkembangan bisnisnya untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan tetap akurat dan sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Sistem informasi akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi, mengubahnya menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan, dan melakukan pengawasan yang tepat terhadap aset perusahaan.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan utama dari sistem informasi akuntansi adalah memastikan bahwa akuntansi dapat menghasilkan informasi keuangan yang teratur, tepat waktu, relevan, dan dapat diandalkan dengan seefisien mungkin. Karena itu, semua informasi keuangan memiliki nilai yang penting.

#### **4. Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi**

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya, sistem informasi akuntansi melibatkan beberapa komponen yang penting. Untuk pencapaian tujuannya, menurut Mulyadi (2016:3), unsur-unsur sistem informasi akuntansi sebagai berikut:

##### **a. Formulir**

Formulir yaitu dokumen tertulis yang digunakan oleh organisasi untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam catatan organisasi. Informasi mengenai kejadian yang dialami oleh organisasi dicatat di atas sehelai kertas.



b. Jurnal

Jurnal adalah pencatatan pertama dalam akuntansi yang dipergunakan untuk mencatat, mengelompokkan, dan mengurus dokumen keuangan serta dokumen lain. Dalam jurnal keuangan utama, data akan diatur secara teratur dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya agar dapat disajikan dalam laporan keuangan.

c. Buku besar

Buku besar atau general ledger terdiri dari daftar rekening yang digunakan untuk merapikan catatan keuangan yang telah dijurnal sebelumnya. Rekaman keuangan yang tercatat di buku besar disajikan sebagai komponen informasi yang akan dipaparkan dalam laporan keuangan.

d. Buku pembantu

Buku pembantu sering kali dipergunakan untuk mendukung buku besar ketika informasi keuangan telah dikategorikan dalam buku besar dan membutuhkan rincian yang lebih detail, buku bantu dapat disusun. Buku pembantu merupakan kumpulan rekening-rekening yang lebih terperinci daripada dokumen keuangan yang tercantum dalam buku besar.

e. Buku pembantu seringkali dipakai untuk mendukung buku besar ketika dokumentasi keuangan sudah diorganisir di buku besar dan butuh rincian tambahan, maka digunakan buku asisten. Buku pembantu merupakan kumpulan rekening-rekening yang turut menampilkan informasi keuangan secara lebih rinci dibandingkan dengan yang terdapat dalam buku besar.

f. Laporan

Hasil akhir dari proses akuntansi adalah pembuatan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan ekuitas, laporan biaya produksi, dan lainnya. Dalam laporan ini terdapat informasi yang diperoleh dari proses akuntansi.

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Widjajanto (2016:4) yang menyatakan bahwa suatu Sistem Informasi Akuntansi selalu terbentuk dari:

- a. Berbagai dokumen yang dicetak, termasuk faktur, nota, cek, dan berbagai laporan, sangat penting dalam pengembangan sistem akuntansi dan administrasi kantor. Dokumen-dokumen tersebut juga menjadi dasar dari prosedur-prosedur dalam pembuatan catatan akuntansi.
- b. Beberapa sumber informasi, baik dalam bentuk fisik seperti kertas dan juga buku-buku tradisional, maupun dalam bentuk elektronik yang hanya bisa diakses melalui komputer. Koleksi ini meliputi jurnal, catatan asli, serta buku besar utama dan sub-buku besar perusahaan.
- c. Sejumlah laporan atau pernyataan, seperti contohnya keseluruhan saldo, ringkasan buku besar, perhitungan laba-rugi, dan keseimbangan.
- d. Sekumpulan tugas administrasi, seperti pengelolaan data elektronik, yang perlu dikerjakan untuk mencatat informasi keuangan pada berbagai dokumen akuntansi, termasuk formulir, buku, jurnal, dan buku besar, serta untuk menyusun laporan dan surat pernyataan.
- e. Pemanfaatan perangkat kantor, terutama komputer, printer, dan alat komunikasi untuk mengirimkan informasi yang dibutuhkan dalam menjalankan sistem operasional

## 5. Prosedur Sistem Informasi Akuntansi

Pada umumnya, sistem adalah serangkaian komponen yang lebih kecil, yang disebut sebagai subsistem, yang saling terhubung dan berinteraksi untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Setiap sistem atau subsistem memiliki serangkaian proses yang meliputi input, proses, dan output dalam dirinya sendiri. Cara kerja suatu sistem dimulai dengan menginputkan data atau sumber daya ke dalam sistem yang telah direncanakan, kemudian data tersebut diolah sesuai dengan perancangan sistemnya, sehingga menghasilkan output.

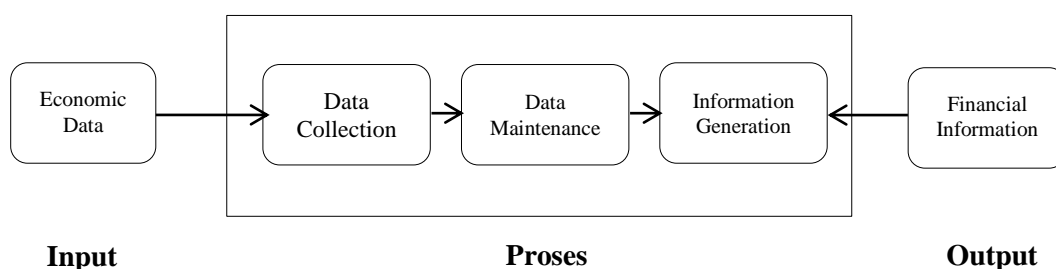
Sistem informasi ialah suatu rangkaian prosedur resmi yang mencakup pengumpulan fakta, pengolahan ke dalam informasi, serta penyebaran kepada pengguna. Informasi yang diinginkan dikumpulkan dengan mengumpulkan data yang relevan. Informasi tersebut kemudian diproses dan diolah sesuai dengan prosedur yang telah disiapkan untuk selanjutnya disebarkan kepada pengguna informasi tersebut, termasuk di dalam perusahaan dan di luar perusahaan.

Sistem informasi menerima data masukan yang biasa disebut sebagai transaksi. Setelah memasukkan data, data tersebut akan melalui serangkaian proses untuk kemudian dihasilkan menjadi output berupa informasi. Hasil akhirnya akan disebarkan kepada pengguna informasi perusahaan sebagai landasan untuk membuat keputusan. Transaksi dalam sistem informasi mengacu pada peristiwa yang memiliki dampak signifikan bagi organisasi dan diolah oleh sistem informasi sebagai bagian dari proses kerja.

Akuntansi sangatlah penting bagi setiap organisasi karena menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan. Beberapa informasi keuangan secara cepat mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka waktu akuntansi yang spesifik.

Laporan keuangan juga menampilkan posisi aset dan ekuitas pada saat tertentu. Pengetahuan akan hal tersebut sangat diharapkan oleh para pemakai informasi akuntansi untuk dimanfaatkan dalam berbagai tujuan. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) melibatkan serangkaian langkah formal, sebagaimana yang terdapat dalam struktur sistem informasi, yang meliputi penghimpunan data, transformasi menjadi informasi, dan distribusi kepada para pemakai. Data ekonomi yang disajikan mencakup informasi keuangan dan non-keuangan yang akhirnya menghasilkan aktivitas transaksi keuangan. Informasi akuntansi dibuat berdasarkan pengolahan data ekonomi. Kemudian, informasi keuangan diberikan kepada pihak yang memerlukan data keuangan..

**Gambar 2.1. Sistem Informasi di dalam aktivitas akuntansi**



(Sumber: Wilkinson et.al., 2018)

### 2.1.3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

#### 1. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam pengelolaan dana untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat melalui ragam pembangunan yang dilakukan, baik dari segi fisik maupun non fisik. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah tersebut diperincikan dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan melihat laporan keuangan, tentunya pihak yang berkepentingan dapat memperoleh informasi tentang

seberapa baik keuangan suatu pemerintah daerah itu. yang mencerminkan kemampuan pihak pemerintah daerah untuk menyokong pelaksanaan tugas pembangunan di daerahnya.

Dwi & Mahfud (2017:41) menjelaskan bahwa “Laporan keuangan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menggunakan keuangan daerah dalam kerangka otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini merupakan standar evaluasi kinerja pemerintahan yang harus dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran.” Menurut Dadang (2015:26) menyatakan bahwa “Laporan keuangan pemerintah daerah adalah bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi dan operasional pemerintah daerah.”

Menurut Bambang (2017:66) “Laporan keuangan adalah dokumen yang sistematis tentang kondisi keuangan dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang memberikan informasi tentang keadaan keuangan, pelaksanaan anggaran, kelebihan anggaran, aliran kas, kinerja operasional, dan perubahan dalam kepemilikan perusahaan yang bermanfaat bagi orang-orang yang menggunakan informasi tersebut untuk membuat dan mengevaluasi keputusan tentang penggunaan sumber daya.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan dokumen yang terstruktur mengenai kondisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu organisasi yang kemudian disampaikan dalam bentuk laporan. Entitas pelaporan sendiri merupakan sebuah lembaga pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih badan akuntansi atau pelaporan yang harus menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan hukum.

Menurut Erlina dkk (2015:25), “Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat diukur dari sejauh mana pencatatan dan transaksi ekonomi yang terkait dengan uang entitas akuntansi yang beroperasi dalam pemerintahan daerah dapat mencerminkan aktivitas yang terkait. Laporan itu bermanfaat sebagai bukti pengelolaan keuangan dari lembaga akuntansi, serta sebagai pijakan untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak yang memerlukannya.” Menurut Winwin & Abdulloh (2017:7), “Pelaporan keuangan yang efisien adalah hasil dari penyajian informasi keuangan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam rangka mencapai pelaporan keuangan yang efisien, dibutuhkan penyusunan informasi keuangan yang memenuhi standar kualitas yang tepat.”

Berdasarkan pandangan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah dapat dinyatakan suatu cara pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan dan transaksi keuangan yang dilakukannya. Laporan keuangan memberikan data mengenai keuangan suatu entitas dengan jelas untuk memfasilitasi pelaksanaan kewenangan otonomi dan operasional pemerintah daerah.

## **2. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan adalah dokumen yang sistematis mengenai kondisi keuangan dan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan terkait dengan kondisi keuangan, pencapaian anggaran, kelebihan anggaran, aliran kas, dan pelaporan. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan data tentang kinerja keuangan dan perubahan kepemilikan suatu perusahaan yang berguna bagi para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan terkait penyaluran dana.

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Ppelaporan keuangan pemerintah bertujuan untuk memberikan dan menyajikan informasi yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan juga bertujuan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan terhadap sumber daya yang dipercayakan kepadanya”, dengan, yaitu:

- a. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan posisi ekuitas pemerintah;
- b. Memberikan informasi mengenai perubahan status sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah;
- c. Memberikan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Memberikan informasi tentang kepatuhan aktual terhadap anggaran;
- e. Memberikan informasi tentang bagaimana entitas pelapor mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Memberikan informasi mengenai potensi pemerintah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
- g. Memberikan informasi yang berguna dalam menilai kemampuan entitas pelapor dalam mendanai aktivitasnya

Secara keseluruhan, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang terus berlanjut, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang terus berlanjut, dan risiko serta ketidakpastian yang terkait. Laporan ini juga memiliki peran dalam memproyeksikan masa depan dan memberikan

informasi yang berguna dalam hal tersebut. Menurut PP 71 Tahun 2010, informasi keuangan juga memberikan informasi kepada penggunanya tentang:

- a. Menunjukkan apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai anggaran; dan
- b. Menunjukkan apakah sumber daya diterima dan digunakan sesuai ketentuan, termasuk anggaran yang ditetapkan DPR/DPRD.

### **3. Komponen-Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Komponen laporan keuangan meliputi laporan primer dan laporan tambahan. Ini mencakup beragam elemen yang berkontribusi pada keseluruhan gambaran keuangan perusahaan. Berbagai jenis laporan keuangan disesuaikan dengan kegiatan bisnis perusahaan dan kebutuhan informasi keuangan dari pihak terkait untuk perusahaan tertentu. Menurut Standar Akuntansi Keuangan Nomor 421, entitas harus mengakui aset keuangan yang dihasilkan dari perjanjian yang memenuhi definisi aset keuangan. Aspek kedua dari definisi ini memerlukan kepastian bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan aset keuangan akan mengalir ke entitas. Aset keuangan adalah klaim terhadap entitas lain, yang memberikan kepada entitas yang memegang aset keuangan hak untuk memperoleh kas, atau hak untuk menukar aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan instrumen ekuitas entitas lain. Aset keuangan mencakup arus kas, kontrak masa depan, dan aset keuangan berdasarkan perjanjian pasti untuk memperoleh aset keuangan di masa depan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 1 tahun 2015 bagian 3, Laporan Keuangan yang komprehensif umumnya mencakup "Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal (dapat disajikan dalam bentuk Laporan Arus Kas atau Laporan Arus Dana), catatan dan laporan



tambahan, serta informasi tambahan yang penting dalam Laporan Keuangan. Lainnya, ada juga jadwal data ekstra yang terkait dengan dokumen tersebut, seperti informasi keuangan mengenai sektor industri dan wilayah, serta pengumuman perubahan harga.” Menurut Peraturan Pemerintahan No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan terdiri dari, yaitu:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran berisikan ringkasan terkait dengan sumber dana, distribusi, dan penggunaan keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang menyajikan perbandingan suatu anggaran dan juga penggunaannya pada suatu periode laporan tertentu.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan data terkait perubahan saldo anggaran lebih pada suatu periode pelaporan dibandingkan dengan periode pelaporan sebelumnya.

c. Laporan Operasional

Laporan operasional merangkum sumber daya ekonomi yang meningkatkan kekayaan bersama dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas memperlihatkan perbedaan dalam ekuitas dari tahun laporan ke tahun sebelumnya.

e. Neraca

Neraca mencerminkan kondisi keuangan suatu entitas pelaporan terkait dengan aset, hutang, dan modal pada waktu tertentu.

f. Laporan Arus Kas

Laporan keuangan menunjukkan data keuangan yang berkaitan dengan aktivitas, investasi, pendapatan, dan aktivitas perubahan yang menunjukkan saldo awal, pendapatan, pengeluaran, dan saldo akhir dana pusat maupun daerah pada periode tertentu..

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Penjelasan atas laporan keuangan meliputi uraian atau penjelasan mengenai angka-angka dalam laporan pelaksanaan anggaran, laporan surplus atau perubahan, laporan operasi, laporan perubahan modal, laporan pendapatan, dan laporan arus kas. Ikhtisar pelaporan keuangan juga memuat uraian tentang metode akuntansi yang digunakan oleh entitas pelapor, serta informasi lain yang diperlukan dan disetujui untuk diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Hal ini juga mencakup pengungkapan yang diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar.

#### **4. Indikator Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Sesuai dengan SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, ciri-ciri kualitatif laporan keuangan adalah standar yang perlu dipenuhi dalam informasi akuntansi agar dapat mencapai tujuannya. Keempat kriteria di bawah ini harus terpenuhi untuk memastikan agar laporan keuangan pemerintah mencapai standar kualitas yang diinginkan:

a. Relevan

Laporan keuangan dianggap relevan jika informasi yang terdapat di dalamnya dapat berdampak pada keputusan pengguna dengan membantu mereka dalam menilai peristiwa yang terjadi di masa lalu atau sekarang, serta memprediksi masa depan, dan mengkonfirmasi atau memperbaiki hasil evaluasi mereka di masa lalu. Oleh karena itu, data keuangan yang signifikan dapat dikaitkan dengan tujuan penggunaannya.

b. Andal

Laporan keuangan harus menyajikan informasi dengan jelas dan benar, tanpa menyajikan informasi yang menyesatkan atau kesalahan yang signifikan, dan semua informasi harus dapat diverifikasi. Informasi mungkin penting, namun jika cara penyajiannya tidak dapat dipercaya maka pemanfaatan informasi tersebut berpotensi menyesatkan.

c. Dapat dibandingkan

Isi yang terdapat dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dari periode sebelumnya atau laporan keuangan dari entitas lain yang serupa secara umum. Perbandingan bisa dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Perbandingan internal terjadi ketika suatu entitas menggunakan kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun.

d. Dapat Dipahami

Isi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat dimengerti oleh para pengguna dan disampaikan dalam format dan terminologi yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki topik atau tema yang hampir serupa dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini, diantaranya:

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Lubis, Muhammad Hidayat. (2019)	Analisis Sistem Informasi Akuntansi Atas Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara	Hasil studi menunjukkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga laporan keuangan pemerintah mereka memiliki kualitas yang baik, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara telah mencapai standar kualitas yang baik.
2	Pratama, Wirja Wahyu. (2020)	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara)	Hasil studi ini menunjukkan bahwa kinerja Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara masih belum maksimal dalam penerapan Sistem Akuntansi keuangan daerah karena kualitas SDM-nya masih kurang baik dalam hal pengetahuan dan tingkat pendidikan.
3	Iwan, Candra. (2022)	<i>Analisis Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) Dalam Perspektif Akuntansi Syariah Pada Dinas Sosial Provinsi Lampung.</i>	Hasil riset menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berbasis software SIPPKD dapat meningkatkan mutu laporan keuangan DINSOS Provinsi Lampung. Kondisi ini disebabkan oleh kemampuan laporan keuangan DINSOS Provinsi Lampung dalam memenuhi standar kualitas laporan keuangan entitas pemerintah daerah sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP), yaitu relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
4	Wijaya, Nabila Rahmadanti Putri. (2022)	Analisis Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lantamal VI Makassar.	Berdasarkan hasil studi, disimpulkan bahwa Latamal VI Makassar telah memenuhi aspek-aspek yang diperlukan untuk memastikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas, yaitu dapat dipercaya, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan Lantamal VI Makassar telah mencapai standar kualitas yang baik.
5	Aji, Wahyu Setiyo. (2022)	Analisis Optimalisasi Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Kualitas Pelaporan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati)	Hasil riset menunjukkan bahwa ditemukannya urgensi tertentu yang dianggap menjadi penghambat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Urgensi tersebut muncul ketika penyusunan laporan keuangan yang diproses melalui SIMDA.
6	Ramadhani, Dea Putri (2022)	Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (Siadinda) Dalam Pengelolaan Data Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	Penelitian menemukan bahwa penerapan SIADINDA dalam manajemen data keuangan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah berhasil sesuai dengan standar pengukuran sistem informasi akuntansi, yakni ketersediaan, keamanan, maintainability, dan integrasi.
7	Mulki, Sri (2021)	Analisis Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tenggara	Hasil studi menunjukkan bahwa berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, lembaga pemerintahan ini dianggap telah memiliki sistem informasi akuntansi yang cukup baik untuk mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

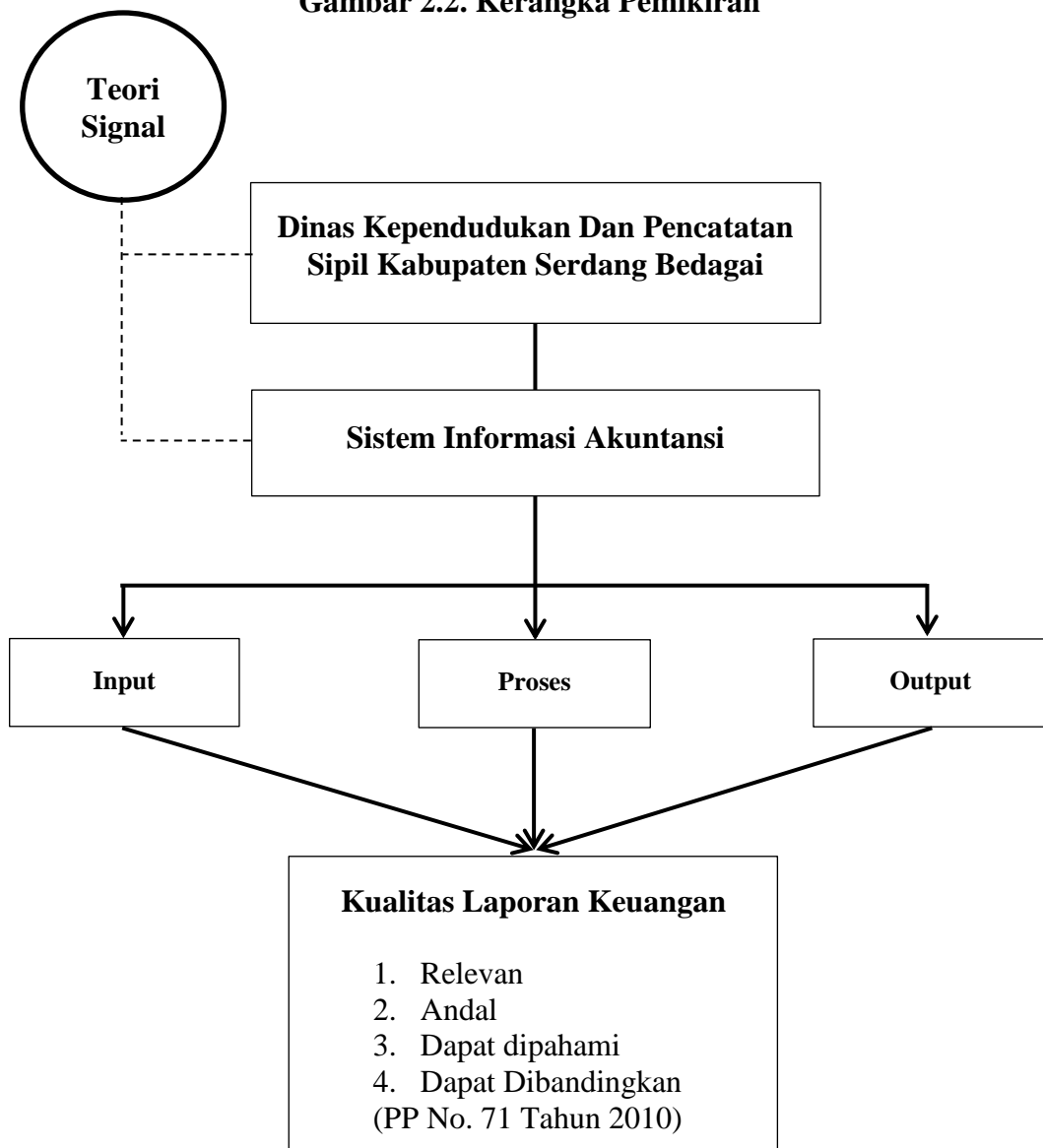
Pada umumnya, suatu organisasi/instansi publik berkewajiban untuk memberikan sinyal informasi (*signaling theory*) kepada para pihak yang memiliki kepentingan, khususnya yang mencerminkan kondisi keuangan instansi tersebut.

Begitu juga dengan instansi pemerintah daerah. Seiring dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya pemerintahan yang baik, maka setiap instansi pemerintah daerah dituntut untuk dapat bersifat transparan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem informasi akuntansi adalah bagian yang sangat vital dalam upaya untuk meningkatkan tingkat akurasi dari laporan keuangan. Pemerintah daerah butuh sistem informasi keuangan untuk monitoring dan evaluasi pengelolaan dana di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat pemerintahan daerah. Penerapan sistem informasi akuntansi di daerah melibatkan pengumpulan data keuangan pemerintah daerah, pengolahan informasi tersebut, dan penghasilan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk pengambilan keputusan. Dengan menerapkan standar pemerintah yang berkualitas, pemerintah daerah akan memiliki informasi yang berkualitas juga, karena laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang relevan, terpercaya, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami.

Berdasarkan paparan dan temuan dari beberapa ahli sebelumnya, maka skema konsep dalam kajian ini dapat terlihat pada ilustrasi di bawah ini:

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran



(Sumber: Wilkinson et.al., 2018 & PP No. 71 Tahun 2010)

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Deskriptif merupakan suatu teknik untuk menyelesaikan masalah dengan menjelaskan keadaan subjek atau objek dalam studi. Subyek tersebut dapat meliputi orang perorangan, organisasi, komunitas, dan sebagainya. Penelitian ini berlandaskan pada informasi yang dapat diamati atau realitas yang sedang terjadi. Hal ini senada dengan pendapat Sugiyono (2018:21) yang menjelaskan bahwa “Pendekatan deskriptif dipakai untuk menjelaskan atau menganalisis data penelitian tanpa membuat generalisasi yang lebih luas.”

Berdasarkan pemaparan pendapat di atas, maka penelitian deskriptif merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan kenyataan tanpa memaksa dalam keadaan tertentu yang menekankan makna dari hasilnya. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menguraikan atau menjelaskan isu yang berkaitan dengan Analisis Sistem Informasi Akuntansi Untuk Menilai Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.

#### **3.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Adapun penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yang beralamat di Jalan



Negara No.300, Firdaus, Kec. Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara 20995.

## 2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, yang dimulai dari bulan Desember 2023 s/d Maret 2024.

**Tabel 3.1. Rencana Jadwal Penelitian**

No	Jenis Penelitian	Desember 2023					Januari 2024					Februari 2024					Maret 2024			
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
1	Pra penelitian	■																		
2	Pengajuan judul		■																	
3	Penyusunan Proposal			■	■	■	■	■	■	■	■									
4	Bimbingan proposal						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
5	Seminar proposal											■	■	■	■	■				
6	Perbaikan proposal												■	■	■	■				
7	Penelitian Skripsi															■	■	■	■	
8	Bimbingan skripsi															■	■	■	■	
9	Sidang meja hijau																		■	

### 3.3. Definisi Operasional

Sugiyono (2018:31), menyatakan bahwa “Definisi operasional merupakan proses menentukan konsep atau karakteristik yang akan diteliti agar dapat diubah menjadi variabel yang dapat diukur.” Definisi operasional merupakan suatu metode yang digunakan untuk menjelaskan teknik khusus yang digunakan dalam menyelidiki dan menilai suatu konsep. Hal ini memungkinkan para peneliti lain untuk melakukan pengukuran yang sama atau menciptakan metode pengukuran yang lebih efektif.

Berdasarkan pengertian di atas maka definisi operasional mengenai Analisis Sistem Informasi Akuntansi untuk menilai kualitas Laporan Keuangan

Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yaitu:

**Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Indikator</b>
Sistem Informasi Akuntansi	Sistem akuntansi informasi adalah suatu struktur yang dapat menghimpun, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi para pengambil keputusan.. (Romney & Steinbart, 2018).	1. Input 2. Proses 3. Ouput (Wilkinson et.al., 2018)
Kualitas Laporan Keuangan	Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah ukuran yang menilai atau merinci pengukuran, pencatatan, dan transaksi ekonomi yang menyatakan aktivitas yang berhubungan dengan uang dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintahan daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggung jawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. (Erlina dkk, 2015)	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dipahami 4. Dapat Dibandingkan (PP No. 71 Tahun 2010)

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam studi ini berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Sugiyono (2018:187) mengungkapkan bahwa sumber primer ialah sumber informasi yang memberikan data langsung kepada peneliti, sementara data sekunder merupakan sumber yang tidak memberikan data langsung kepada peneliti, contohnya melalui pihak lain atau melalui dokumen. Adapun informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari, yaitu:

1. Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari objek yang sedang diteliti tanpa melalui perantara. Data utama didapatkan dengan melakukan interaksi langsung dengan sumber informasi.
2. Data sekunder merujuk pada informasi tambahan yang digunakan dalam penelitian, yang diperoleh dari sumber-sumber seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya. Informasi ini dapat diperoleh baik secara konvensional maupun melalui internet.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka pada tahap penelitian ini data diperoleh melalui:

1. Observasi

Observasi merupakan tahapan dimana kita mengamati dan mencatat secara teratur, logis, jujur, dan rasional mengenai berbagai peristiwa yang berguna untuk menilai perilaku seseorang atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, penulis mengamati langsung bagaimana implementasi Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, dengan cara mempertanyakan permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian. Pada penelitian ini untuk mendapatkan informasi terkait implementasi Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan

pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, wawancara dilakukan kepada 3 (tiga) orang informan sebagai berikut:

- a. Kepala Bagian Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. Kepala Sub Bagian Layanan Sistem Informasi Akuntansi Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. Pegawai Bagian Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai.

### 3. Dokumen

Wawancara merupakan kegiatan mengumpulkan data yang dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, dengan cara mempertanyakan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang dipakai yakni Analisis Deskriptif, yakni suatu teknik untuk menghimpun, mengelompokkan, meneliti, serta mengartikan data guna menyajikan gambaran yang tepat mengenai permasalahan yang sedang diselidiki. Metode ini berguna untuk memperoleh pemahaman tentang informasi yang ada serta mengidentifikasi kemungkinan pola yang terdapat dalam data. Analisis deskriptif lebih berkaitan dengan penjabaran hasil dari wawancara dan studi dokumentasi. Data yang sudah dikumpulkan akan diproses secara matematis dan dijelaskan dalam bentuk narasi. Peneliti melakukan beberapa tahapan dalam proses evaluasi data. Tindakan-tindakan tersebut mencakup:

1. Menelusuri dan mengumpulkan informasi yang terkait objek penelitian.

Peneliti pada tahap ini mengumpulkan semua data yang diperlukan dari bahan pustaka yang terkait dengan topik penelitian, dan juga dokumen-dokumen yang diperoleh dari tempat penelitian..

2. Menganalisis data secara mendalam

Pengolahan data melibatkan langkah-langkah dalam mengatur, menyusun, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan data dengan maksud untuk menemukan solusi berdasarkan fokus atau permasalahan yang ingin diselesaikan. Dengan melibatkan serangkaian kegiatan tersebut, data kualitatif yang biasanya tersebar dan menumpuk dapat diorganisir dengan cara yang lebih simpel, sehingga menjadi lebih mudah untuk dipahami.

3. Menginterpretasi hasil penelitian secara lebih mendalam

Pada tahap ini, output dari langkah awal dibandingkan dengan berbagai teori yang terkait dengan topik penelitian. Istilah dan gagasan itu mengacu pada kajian-kajian atau referensi lain yang telah dimodifikasi sesuai dengan fokus penelitian.

4. Menyimpulkan hasil penelitian secara deskripsi

Pada tahap selanjutnya yaitu melakukan penarikan suatu kesimpulan dan kembali melakukan pengecekan ulang terhadap data yang diperoleh. Biasanya penilaian awal yang di dapat masih bersifat sementara, dan dapat berubah apabila tidak didukung dengan bukti yang kuat selama proses pengumpulan data berikutnya. Apabila suatu kesimpulan diperkuat oleh bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan itu dapat diandalkan.

Diharapkan bahwa studi kualitatif akan menghasilkan temuan atau pola yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Penemuan dapat mencakup penjelasan atau deskripsi suatu benda yang sebelumnya tidak begitu jelas, tetapi setelah diuraikan menjadi lebih terang.

### **3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data (Triangulasi)**

Teknik validasi data adalah proses pengujian keakuratan data yang diperoleh untuk memastikan bahwa data tersebut sesuai dengan tingkat kepercayaan dan tujuan penelitian. Peneliti melakukan teknik keabsahan data melalui penggunaan triangulasi, yaitu proses memeriksa hasil penelitian dengan membandingkannya untuk menjamin keandalan informasi yang diperoleh dari berbagai waktu dan alat yang berbeda. Menurut Patton yang dikutip oleh Bungin (2019:265), triangulasi dapat dilaksanakan dengan:

1. Menganalisis kembali data pengamatan dan membandingkannya dengan hasil wawancara.
2. Memeriksa dan mengevaluasi pernyataan yang disampaikan oleh seorang informan di hadapan publik dengan apa yang ia sampaikan dalam percakapan pribadi.
3. Mendengarkan dan membandingkan informasi yang diberikan oleh orang-orang mengenai kondisi penelitian dengan apa yang telah disampaikannya sepanjang waktu.
4. Mengamati dan membandingkan situasi dan sudut pandang seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan dari orang lain.
5. Melakukan tinjauan dan perbandingan antara hasil wawancara dengan dokumen-dokumen terkait lainnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian**

###### **1. Profil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yang beralamat di Jalan Negara Nomor 300 Firdaus Kecamatan Sei Rempah Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang berfungsi dalam penataan dan penerbitan dokumen, data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

###### **2. Visi, Misi dan Motto Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai**

Adapun visi dan misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu:

- a. Visi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai,

Visi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yaitu “Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai Yang Mandiri, Sejahtera dan Religius”.

- b. Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu:

- 1) Mengelola layanan publik dengan tata kelola Pemerintahan Daerah yang bersih dan efisien sesuai dengan peraturan dan peraturan yang berlaku.
- 2) Melakukan pemberdayaan komunitas dalam segala aspek dan meningkatkan aksesibilitas fasilitas sosial, umum, dan ruang publik bagi semua golongan, termasuk anak-anak, perempuan, dan kelompok disabilitas.

- c. Motto Pelayanan

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yaitu berupaya mewujudkan pelayanan yang PRIMA, yaitu:

P = Profesional

R = Responsif

I = Inovatif

M = Moderen

A = Akuntabel



### **3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai**

Organisasi adalah suatu kumpulan manusia yang memiliki visi dan misi yang sama, memiliki tujuan dan tindakan yang searah dengan pola pikir yang sama. Dalam praktiknya, sebuah perusahaan memerlukan suatu kerangka organisasi agar alur kerja dan koordinasi lebih teratur dan terorganisir. Struktur organisasi adalah komponen penting dalam manajemen suatu entitas. Kerangka dasar ini menetapkan cara pembagian tugas dan tanggung jawab, aliran informasi, dan interaksi antar unit atau departemen dalam organisasi.

Pada hakikatnya, struktur organisasi mencerminkan pembagian tugas dan cara berbagai fungsi atau kegiatan diintegrasikan (dikoordinasikan). Selain dari itu, susunan organisasi juga mencerminkan keahlian posisi, manajemen, dan aliran laporan. Struktur organisasi adalah dasar pengaturan suatu perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien sesuai dengan tujuan yang ditetapkan..

Begitu juga dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, dalam kegiatan operasionalnya memiliki spesialisasi pekerjaan yang memiliki tugas dan tanggungjawab pada masing-masing unit kerja. Adapun struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai dapat dilihat pada gambar 4.1. dibawah ini :

Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai



(Sumber: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai)

#### **4.1.2. Deskripsi Hasil Wawancara**

##### **1. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai**

Keberhasilan sebuah perusahaan/instansi dapat diukur dari sejauhmana kemampuannya dalam memanfaatkan perkembangan teknologi sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, yang akan berdampak positif pada kinerja perusahaan/instansi tersebut. Salah satu bentuk sistem informasi yang digunakan di perusahaan atau lembaga adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan komponen vital dari suatu entitas yang bertugas untuk menciptakan data keuangan yang diperlukan guna mendukung pengambilan keputusan perusahaan atau instansi. Pemerintah daerah membutuhkan sistem informasi keuangan untuk memonitor dan mengevaluasi pengelolaan keuangan setiap unit organisasi di daerah..

Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, dalam melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangannya telah menerapkan sistem informasi akuntansi. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai berikut:

“Jadi dalam penyusunan maupun penyajian laporan keuangan, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai telah memiliki aplikasi yang bernama SIKD. SIKD ini merupakan singkatan dari Sistem Informasi Keuangan Daerah.” (Wawancara pada tanggal 19 Desember 2023).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai telah memiliki aplikasi yang bernama Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang digunakan dalam

melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangannya. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian Layanan Sistem Informasi Akuntansi Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai yang menyatakan sebagai berikut:

“Benar, ada aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah atau disingkat SIKD namanya, tentunya aplikasi ini sangat membantu kami dalam melakukan penyusunan maupun pelaporan kondisi keuangan pada dinas ini, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran maupun penyajiannya semuanya tertera pada aplikasi tersebut.” (Wawancara pada tanggal 19 Desember 2023).

Adapun pelaksanaan sistem informasi akuntansi berbasis aplikasi tersebut pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai telah digunakan sejak tahun 2014, dimana adanya keharusan bagi pemerintah daerah untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang standar akuntansi berbasis akrual. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bagian Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai berikut:

“Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan (GAP) berujung pada keputusan untuk menghilangkan kriteria kas negara dalam provisi. Dalam konteks ini juga diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Prinsip Akuntansi Akrual. Oleh karena itu, kami telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sejak tahun 2014..” (Wawancara pada tanggal 19 Desember 2023).

Penggunaan akuntansi akrual membuat penyusunan laporan keuangan menjadi lebih mudah dan memberikan laporan keuangan yang benar-benar sesuai dengan kemampuan OPD. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Sub Bagian Layanan Sistem Informasi Akuntansi Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai berikut:

“Penerapan akuntansi saat ini tentunya sangat bermanfaat bagi kami khususnya di bidang keuangan daerah, karena sebelum diperkenalkannya akuntansi akrual saat ini, kami masih menggunakan metode kas untuk akuntansi akrual, yang mana kita harus menganalisis transaksi mana saja dicatat dalam neraca setelah dilaporkan dengan metode kas. Hal ini sangat berbeda dengan akuntansi akrual, dimana data yang dimasukkan ke dalam transaksi bersifat jelas.” (Wawancara pada tanggal 19 Desember 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi basis akrual sangat bermanfaat dan mempermudah dalam proses penyusunan laporan keuangan yang disampaikan oleh pengelola keuangan pemerintah. Secara umum, akuntansi berbasis akrual adalah suatu metode akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, direkam, dan dipresentasikan dalam laporan keuangan saat transaksi terjadi, tanpa memperhatikan waktu kapan kas atau sejenisnya diterima atau dibayarkan.

Untuk menggambarkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang berbasis komputerisasi, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai memberikan gambaran sistem informasi keuangan dengan keterangan sebagai berikut:

a. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, pengklasifikasian, penafsiran, dan pengikhtisaran transaksi peristiwa keuangan dan pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntansi.

1) Siklus Akuntansi

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai telah menggunakan pedoman Pemandagri No. 64 Tahun 2013

mengenai implementasi SAP berbasis akrual, di mana setiap transaksi langsung direkam meskipun pendapatan atau belanja belum direalisasikan. Meskipun demikian, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai memiliki beberapa catatan yang tidak sesuai dengan regulasi Pemendagri yang berlaku. Hal ini dapat kita ketahui berdasarkan wawancara dengan Pegawai Sub Bagian Layanan Sistem Informasi Akuntansi Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, yang menyatakan sebagai berikut:

“Ada beberapa transaksi yang tidak segera dicatat, seperti pembelian peralatan yang tidak segera dicatat dan hanya dicatat pada saat dimintakan bukti transaksinya, sehingga dicatat begitu saja.” (Wawancara pada tanggal 19 Desember 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai sudah sepenuhnya sesuai dengan sistem akuntansi basis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010.

## 2) Junal

Sebagai pengguna anggaran, Organisasi Perangkat Daerah (RPO) harus melaksanakan proses akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat dalam bentuk jurnal akuntansi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan proses pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

3) Buku Besar

Tahap selanjutnya yaitu memposting atau memindahkan transaksi dari jurnal/akuntansi ke buku besar. Saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai telah melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

4) Neraca Saldo

Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan laporan keuangan, Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai menyusun neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi semua kode akun dan saldo pada tanggal tertentu.

5) Jurnal Penyesuaian

Proses selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian aset tetap. Dalam penyusunan jurnal penyesuaian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai menghitung penyusutan dan amortisasi aset tetap. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai masih melakukan beberapa kesalahan. sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Bagian Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut:

“Saat melaksanakan proses perhitungan penyusutan dan amortisasi aset tetap kami masih sering salah dalam hal menghitung umur manfaat aset tetap misalnya dalam peralatan, karena manfaat dari peralatan tersebut sudah buruk sehingga sering asal nebak umur manfaat peralatan tersebut” (Wawancara pada tanggal 19 Desember 2023).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai sering mengalami masalah saat proses perhitungan penyusutan asset tetap, sehingga belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

6) Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Langkah ini merupakan langkah yang paling penting karena merupakan titik sentral dalam proses penyusunan anggaran. Saldo setelah penyesuaian ini termasuk akun-akun yang termasuk dalam laporan keuangan.

7) Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP berbasis akrual, menjelaskan bahwa terdapat lima elemen laporan keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Pelaksanaan Anggaran merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, surplus/defisit, dan kelebihan anggaran serta membandingkan anggaran dan pelaksanaannya pada periode tertentu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan data yang penulis peroleh, total pendapatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp24.918.695.000,00. Total pengeluaran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13.533.099.474,00 yang meliputi biaya pegawai, biaya barang dan jasa, serta belanja modal.

b) Neraca

Berdasarkan data yang penulis peroleh diketahui bahwa jumlah aset 31 Desember 2022 sebesar Rp 9.210.621.813,02, yang terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Jumlah ekuitas 31 Desember 2022 sebesar Rp 9.210.621.813,02.

c) Laporan Operasional

Berdasarkan data yang penulis peroleh diketahui bahwa jumlah pendapatan dan beban pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai 31 Desember 2022 sebesar Rp 24.918.695.000,00, jumlah beban sebesar Rp 13.600.119.593,00.

d) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yakni laporan yang menyediakan informasi mengenai gambaran perubahan antara ekuitas awal dan akhir ekuitas. Berdasarkan data yang penulis peroleh diketahui bahwa jumlah ekuitas awal sebesar Rp 9.256.344.416,02. surplus-LO 11.318.575.407,00. Selisih ekuitas lainnya sebesar Rp

21.297.516,00. Dikurangi kewajiban untuk konsolidasi sebesar (Rp 11.385.595.536,00). Sehingga ekuitas untuk akhir 31 Desember 2022 sebesar Rp 9.210.621.813,02

e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mencakup penjelasan terperinci tentang angka-angka yang disajikan dalam laporan pelaksanaan anggaran. Rekapitulasi perubahan pada posisi keuangan, aktivitas bisnis, perubahan dalam struktur modal, posisi keuangan pada suatu waktu, dan aliran dana. CaLK juga mencakup informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dipraktikkan oleh organisasi yang memberi laporan dan juga informasi lain yang diperlukan dan disarankan untuk diungkapkan dalam platform SAP, serta persyaratan yang diperlukan untuk memastikan penyajian yang tepat dari laporan keuangan. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang diajukan oleh Kementerian Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai telah mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

## **2. Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kualitas laporan keuangan ditentukan oleh kriteria

normatif yang harus dipenuhi dalam penyajian informasi akuntansi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ada empat syarat normatif yang harus terpenuhi agar laporan keuangan pemerintah dapat mencapai kualitas yang diinginkan, yaitu: relevan, dapat dipercaya, dapat dibandingkan, dan dapat dimengerti. Adapun kualitas laporan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dapat diklarifikasi sebagai berikut:

a. Relevan

Relevansi merujuk kepada informasi yang memiliki pengaruh dalam membantu pengguna dalam menilai peristiwa masa lalu atau saat ini, meramalkan masa depan, dan memastikan atau memperbaiki hasil penilaian sebelumnya. Kepala Bagian Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai mengatakan bahwa:

“Laporan keuangan dapat dinyatakan relevan apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bisa mengevaluasi kejadian masa lalu dan masa depan, dan juga bisa mengoreksi hasil kesalahan di masa lalu, dan juga mempengaruhi keputusan, jadi Aplikasi SIKD yang membantu menjawab segala kebutuhan informasi terkait dengan APBD, jadi semua APBD di input ke SIKD.” (Wawancara pada tanggal 19 Desember 2023).

b. Andal

Andal memiliki pengertian bahwa informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus bebas dari informasi yang menyesatkan dan kesalahan yang signifikan. Laporan keuangan wajib menghadirkan setiap informasi secara jujur, dan dapat dipastikan kebenarannya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Keuangan Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, menyatakan bahwa:

“Iya laporan keuangan sudah disajikan secara jujur ehh dan juga verifikasi laporan keuangan tentunya diverifikasi dengan sangat baik, penerimaan dan pengeluaran itu. Tujuan penerapannya untuk memperlancar proses laporan keuangan sampai menjadi laporan keuangan yang utuh, yang sesuai dengan *standar operating procedure* (SOP). Karena semua apa yang kita bikin pasti menuju ke laporan keuangan, karna itu laporan keuangan diperiksa BPK, setelah diperiksa BKP mengeluarkan opini apakah laporan keuangan ini sudah betul, wajar atau tidak.” (Wawancara pada tanggal 19 Desember 2023).

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang ada di dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dari tahun-tahun sebelumnya atau dengan laporan keuangan dari perusahaan/instansi lain yang sejenis. Perbandingan bisa dilakukan dari sudut pandang internal maupun eksternal. Jika perusahaan konsisten dalam menerapkan prinsip akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, maka perbandingan internal dapat dilakukan. Pada waktu yang bersamaan, perbandingan eksternal dapat dilakukan jika perusahaan yang dibandingkan menggunakan prinsip akuntansi yang serupa. Apabila pemerintah daerah ingin menerapkan metode akuntansi yang lebih baik dari yang sedang digunakan, maka perubahan tersebut harus didokumentasikan pada periode ketika perubahan tersebut terjadi.

d. Dapat dipahami

Laporan keuangan yang disajikan harus mudah dimengerti oleh para penggunanya dan dirumuskan dengan format dan kosakata yang sesuai dengan tingkat pemahaman para pengguna. Dengan cara ini, dapat

dihindari kesalahan dalam penafsiran data. Kepala Bagian Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai menyatakan bahwa:

“Iyaa jadi ini Sistem Aplikasi yang ada mudah dipahami oleh pengguna tidak perlu dihitung lagi, sudah terumus dalam sistem, otomatis, cetaknya pun sudah ada template laporan di dalam sistem, jadi sangat-sangat meringkankan dan bisa disesuaikan dengan batas dari pemahaman para penggunanya.” (Wawancara pada tanggal 19 Desember 2023).

#### **4.2. Pembahasan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai telah berhasil meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Dibuktikan dengan adanya pencapaian unsur-unsur laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Meskipun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah kesulitan yang sering terjadi saat menghitung penyusutan aset tetap.

Pada prinsipnya, laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan untuk menyampaikan data tentang keadaan keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan, yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam merancang dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dana. Dengan tujuan ini, diharapkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memiliki kualitas yang baik. Kualitas pelaporan keuangan menjadi penentu apakah laporan keuangan tersebut layak atau tidak. Mutu laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting karena merupakan hasil dari penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

Melaporkan keuangan dengan kualitas yang baik dapat memberikan manfaat dalam menentukan kebijakan pemerintah untuk masa yang akan datang. Jika pelaporan keuangan dapat memberikan manfaat dalam proses pengambilan keputusan, maka akan mempercepat kemajuan pembangunan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk menjalankan tugas dengan efektif, efisien, jujur dan bersih, lembaga pemerintah daerah harus menggunakan sistem informasi akuntansi yang sesuai untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah harus memanfaatkan teknologi terkini secara maksimal untuk memperkuat infrastruktur jaringan informasi dan sistem kerja, sehingga memungkinkan pemerintah untuk bekerja secara terintegrasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan akses antar unit kerja guna meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan.

Dengan didukung oleh Teori Sinyal (*signaling theory*), peran pemerintah daerah sebagai entitas yang bertanggung jawab kepada pihak-pihak terkait harus memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menggunakan sistem informasi keuangan daerah. Dengan sistem informasi yang terkomputerisasi dengan baik dan terhubung dengan internet yang dapat diandalkan, akan menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan standar kualitas. Dengan demikian, informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak pengguna laporan keuangan.

Penggunaan teknologi informasi memiliki peran penting dalam mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah, sehingga laporan keuangan tetap memiliki nilai informatif yang

optimal. Proses pencatatan dan pengelolaan informasi akuntansi melibatkan penerimaan data, prosesnya, dan hasil akhirnya. Informasi dimasukkan ke dalam sistem untuk diolah. Data merupakan informasi yang terkumpul dan diolah oleh sistem penyampaian informasi. Oleh karena itu, informasi yang berguna dan berarti harus diproses dan diubah menjadi bentuk yang berguna, terstruktur dan bermakna yang disebut sebagai data. Hasilnya adalah data yang bermakna dan berguna yang dihasilkan oleh sistem informasi. SIKD adalah software yang dibuat untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan mereka dengan cara yang efisien dan efektif sesuai dengan peraturan hukum, dari perencanaan keuangan, manajemen keuangan, hingga pertanggungjawaban APBD. SIKD adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk memproses data transaksi keuangan dan membuat laporan keuangan sebagai hasilnya. Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Digital (SIKD) di institusi keuangan mengakibatkan laporan keuangan yang bermutu.

Penerapan sistem informasi keuangan daerah bisa membantu dalam menyusun laporan keuangan pemerintah dengan lebih baik dan meningkatkan kualitasnya. Jika sistem informasi berfungsi optimal, maka semua proses akan berjalan dengan lancar dan ini akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang terstruktur untuk pelaporan keuangan, akan meminimalkan kesalahan dalam perhitungan dan mengoptimalkan efisiensi waktu dalam proses pelaporan keuangan. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa standar akuntansi pemerintahan harus dipatuhi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akuntansi Akrual (SAP), sehingga pemerintah

pusat wajib mengajukan laporan keuangan. Menjalankan pedoman akuntansi dan menyajikan laporan keuangan yang bermutu. Untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan keterlibatan dari semua tingkat, mulai dari manajer keuangan dan timnya, sehingga mereka bersedia untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses pengelolaan keuangan, tanggung jawab baik secara fisik maupun dalam pelaporan, serta memastikan kelancaran proses pengelolaan keuangan. Penginputan data ke dalam sistem informasi akuntansi telah selesai, sesuai dengan prinsip akuntansi akrual.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Akuntansi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini ditunjukkan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur laporan keuangan yang berkualitas sebagaimana yang termaktub dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Walaupun masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya tersebut, diantaranya yaitu masih seringnya mengalami masalah saat proses perhitungan penyusutan asset tetap
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai telah memenuhi kualitas yang dikehendaki, sebagaimana yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu: Relevan, Andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat penulis sampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai diharapkan mampu mempertahankan konsistensinya serta terus melakukan sosialisasi pada Satuan Bidang terkait agar kualitas pada laporan keuangan yang disajikan bertahan dan dan semakin baik.
2. Hendaknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai perlu melakukan pendidikan serta pelatihan langsung tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan basis akrual (*accrual basic*) kepada Sumber Daya Manusia SDM yang terkait, dan penempatan untuk SDM nya harus sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Supaya kesalahan saat menyusun serta menyajikan laporan keuangan berbasis akrual (*accrual basic*) dapat diminimalisir.
3. Hendaknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai juga turut melakukan pengawasan dan pengoptimalan sistem *informasi akuntansi yang diterapkan* secara rutin sebagai langkah preventif guna mencegah terjadinya permasalahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Aji, Wahyu Setiyo. (2022). *Analisis Optimalisasi Sistem Informasi Akuntansi Dalam Menunjang Kualitas Pelaporan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati)*. Laporan Magang. Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Bambang, Sugeng. (2017). *Manajemen Keuangan Fundamental*. Yogyakarta: Deepublish.
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Bodnar, G.H, & William S.H. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi*, Buku I. Jakarta: Salemba Empat.
- Dadang, Suwanda. (2015). *Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah Berpedoman. SAP Berbasis Akrual*. Jakarta: PPM Manajemen.
- Dwi Ratmono, Mahfud Sholihin. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Erlina, Rambe, O.S, dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat.
- Godfrey, J., et al. (2017). *Accounting Theory* (7th ed.). New York: McGraw Hill.
- Hanum, Seprida & Pulungan, Khairul Anwar. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi*. Medan: CV. Manhaji.
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Ihsanti, Emilda. (2014). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota)*. *Jurnal Akuntansi*. Padang: Universitas Negeri Padang.

- Ikhsan, Muhammad. (2018). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kota Medan*. Sarjana (S1) thesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Iwan, Candra. (2022). *Analisis Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) Dalam Perspektif Akuntansi Syariah Pada Dinas Sosial Provinsi Lampung*. Sarjana (S1) thesis UIN Raden Intan, Lampung.
- Lubis, Muhammad Hidayat. (2019). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Atas Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara*. Sarjana (S1) thesis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi, Edisi ke-3, Cetakan ke-5*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Pamungkas, Lutfi Rohbilatul. (2018). *Pengaruh Administrasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kota Madiun*. Sarjana (S1) thesis, Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun.
- Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Pratama, Wirja Wahyu. (2020). *Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara)*. Sarjana (S1) thesis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Romney, M.B. & Steinbart, P.J. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi ke-13, Jakarta: Salemba Empat.
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekulibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- Sanjaya, Aditya. (2017). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada SKPD Kabupaten Kampar)*. Pekanbaru: JOM Fekom. Vol. 4, No.1, h. 366-380.
- Sari, Luthfiyah Aptalia (2022). *Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) dalam Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi*. Sarjana (S1) thesis, Universitas Islam 45, Bekasi.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Azhar. (2008). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Gramedia.
- SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.

- Udiyanti, Ni Luh Nyoman Ari, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Nyoman Ari Surya Darmawan. (2014). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Stanf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng)*. Singaraja:e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 2, No. 1.
- Widjajanto, Nugroho. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Wijaya, Nabila Rahmadanti Putri. (2022). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lantamal VI Makassar*. Sarjana (S1) thesis Universitas Bosowa, Makassar.
- Wilkinson, Cerullo, Raval, Wong on Wing. (2000). *Accounting Information system essential Concepts and Application* (4th ed), New York : John Willry & Sons.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.
- Winwin Yadiati, Abdulloh Mubarak. (2017). *Kualitas Pelaporan Keuangan*. Jakarta: PrenadaMedia.
- Zamzami, F., & Nabella Duta Nusa. (2016). *Akuntansi: Pengantar I*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.